

## Soekarno dan Nasakom dalam Pendekatan Idiosinkratik (psikologi kepemimpinan)

Ahmad Burhan Hakim<sup>1)</sup>, Muhyidin<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Jawa Timur, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Jawa Timur, Indonesia

Email : burhanhakim@insud.ac.id<sup>1</sup> , muhyidin059@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstrak :** Orde Lama menjadi salah rezim politik di Indonesia dengan resistensi dan gejala politik yang luar biasa baik didalam dan luar negeri. Kendali pimpinan di bawah Soekarno membawa Indonesia pada nuansa yang berbeda dari pemimpin setelanya. Pertarungan Ideologi yang terjadi didalam negeri memunculkan konsep politik nasakom (nasionalisme, agama dan komunisme) yang berarti secara tidak langsung memakomodir hamper semua ideology yang beredar di dalam negeri. Dengan keputusan tersebut maka dianggap bahwa Soekarno adalah pemimpin Indonesia yang nasionalis pada masa orde lama. Secara Idiosinkratik proses dan latar belakang watak ideologis Soerkano menjadi salah satu faktor dominan yang punya pengaruh besar. Diantaranya bahwa Soekarno adalah pemimpin yang revolusioner, visioner, parlente dan fashionable tentunya. Dalam artikel sederhana ini penulis mengunnakan pendeketah metodologi kualitatif dengan operasional studi kepustakaan. Hal ini mengingat kemudahan akses informasi yang hari bisa di dapatnya. Dengan penjelasan sederhana semacam ini, maka faktor personal punya pengaruh dominan dalam munculnya nasakom. Walaupun secara tentu faktor internal berupa politik domestic juga bisa jadi dominan. Lingkungan Internasional berupa gejala Perang Dingin juga punya peran tidak kalah penting.

**Kata Kunci :** *Rezim Politik, Ideologi, Perang Dingin*

**Abstract :** The Old Order became one of the political regimes in Indonesia with extraordinary political resistance and turmoil both at home and abroad. Leadership control under Soekarno brought Indonesia to a different nuance from its previous leaders. The ideological battle that took place within the country gave rise to the political concept of Nasakom (nationalism, religion and communism) which indirectly accommodated almost all ideology circulating in the country. With this decision, it was assumed that Sukarno was a nationalist Indonesian leader during the Old Order. Idiosyncratic, the process and background of Soerkano's ideological character became one of the dominant factors that had a major influence. Among them is that Soekarno was a revolutionary, visionary, parlente and fashionable leader of course. In this simple article, the author uses a qualitative methodological approach to operational literature studies. This is considering the ease of access to information that can be obtained today. With a simple explanation like this, personal factors have a dominant influence in the emergence of Nasakom. Although of course internal factors in the form of domestic politics can also be dominant. The international environment in the form of the Cold War turmoil also has an equally important role.

**Keywords:** *Political Regime, Ideology, Cold War*

### A. Pendahuluan

Konsep Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom) dicetuskan oleh Sukarno. Rumusan ini mewakili tiga pilar utama yang menjadi kekuatan politik bangsa Indonesia, sejak era pergerakan nasional hingga pasca-kemerdekaan. Nasakom sendiri menjadi ciri khas era Demokrasi Terpimpin yang berlangsung pada 1959 hingga 1965. Namun, gagasan ini ternyata sudah dipikirkan oleh Sukarno jauh sebelum itu, yakni pada 1926. Dalam artikelnya di surat kabar Soeoleh Indonesia Moeda, Sukarno menulis: “Dengan jalan yang kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain,” tulis Sukarno. “Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini,” lanjutnya. Sukarno muda menilai ada tiga aliran politik yang menjadi pilar pergerakan nasional dalam kehidupan bangsa pada zaman kolonial Hindia Belanda kala itu. Pertama adalah kelompok nasionalis yang diwakili *Indische Partij* (IP), kedua golongan

muslimin yang mewujud dalam Sarekat Islam (SI), dan ketiga Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan ideologi marxisme.<sup>1</sup>

Tiga dekade berselang, tepatnya 1956 atau 11 tahun setelah Indonesia merdeka, Bung Karno mengumandangkan kembali gagasan yang pernah dilontarkannya pada 1926 itu. Ia mengkritik sistem Demokrasi Parlementer yang dianggapnya tidak cocok diterapkan di Indonesia. Dikutip dari buku *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta* (2010) karya Zulfikri Suleman, Demokrasi Parlementer melindungi sistem kapitalisme –karena menurut Sukarno, parlemen dikuasai oleh kaum borjuis– dan oleh karenanya tidak akan bisa memakmurkan rakyat. Tak hanya itu, Bung Karno juga menganggap sistem Demokrasi Parlementer juga bisa membahayakan pemerintahan. “Di dalam Demokrasi Parlementer, tiap-tiap orang bisa menjadi raja, tiap-tiap orang bisa memilih, tiap-tiap orang bisa dipilih, tiap-tiap orang bisa memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgasananya,” sebutnya. Maka, pada Februari 1956, Sukarno mengusulkan konsep baru yang disebutnya Demokrasi Terpimpin dengan berpondasi kepada tiga pilar utama: Nasakom. Rosihan Anwar dalam *In Memoriam: Mengenang yang Wafat* (2002) mengungkapkan, konsep Demokrasi Terpimpin dan Nasakom ditentang oleh Mohammad Hatta, sang wakil presiden. Menurut Rosihan, Nasakom berarti bekerja sama dengan PKI dan Hatta kurang cocok dengan itu.<sup>2</sup>

Dalam setiap sistem politik, komunikasi politik merupakan aspek yang tak bisa dipisahkan dan mempunyai dinamika yang efektif untuk memecah kebuntuan yang terjadi antar dan antara kepentingan. Dinamika ini terjadi karena adanya perbedaan, kesamaan maupun kepentingan antarfaksi bahkan ideologi. Perebutan kekuasaan baik dalam konteks yang berada dalam sebuah sistem maupun di luar sistem kerap terjadi di Indonesia. Beberapa kejadian dalam rentang waktu lahirnya Republik Indonesia (1945) hingga pemilihan umum terakhir yang diselenggarakan (2019) menunjukkan beberapa peristiwa yang mengubah struktur komunikasi politik di Indonesia, baik disengaja, maupun tidak disengaja. Rivalitas yang biasanya sering terjadi di Indonesia yaitu antara ideologi Pancasila, Nasionalis, Agama dan Komunisme (Nasakom) seperti yang telah dijelaskan oleh Soekarno (1963) dalam artikelnya yang berjudul Nasionalis, Islamis, dan Marxis. Banyaknya perbedaan dan juga sulitnya mempersatukan Indonesia sebagian besar merupakan cerminan dari karakteristik negara Republik Indonesia, yang terdiri dari 17.504 pulau dan merupakan penggabungan dari berbagai macam suku, budaya, dan agama.<sup>3</sup>

Pola kepemimpinan demokrasi di Indonesia juga tidak bisa dipisahkan dari sistem kepartaian. Kebijakan seorang presiden akan sangat dipengaruhi oleh platform yang diusung oleh partai pendukungnya. Presiden Soekarno misalnya, meski pada awalnya merupakan salah seorang pendiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927 justru mengakhiri pemerintahannya di tahun 1965-1966 justru saat didukung oleh partai dengan dasar ideologis yang berlawanan dengan PNI, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI).<sup>4</sup> Perbedaan ideologi ini membuat potensi konflik selalu ada, apalagi jika melihat bagaimana polarisasi menjadi salah satu isu komunikasi politik secara nasional. Indonesia membutuhkan sebuah kebijakan dan juga manajemen untuk mengelola potensi konflik yang ada untuk menjadikannya sebuah kekuatan positif dalam mengelola negara. Manajemen konflik ini dimaksudkan untuk mencapai kompromi yang efektif sekaligus menemukan jalan tengah.<sup>5</sup>

Konsep jalan tengah ini secara tidak langsung merupakan salah satu visi yang terkandung dalam aspek politik dari ketahanan nasional Indonesia, yang meliputi semua aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, mengandung keuletan dan ketahanan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik

<sup>1</sup> <https://tirto.id/sejarah-nasakom-upaya-sukarno-menyatukan-tiga-kekuatan-politik-dnlt> diakses pada 24/02/2023 pukul 19.09

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Manuputty, A., Patittingi, F., & Ashri, M.. The Existence Of Leading Islands Securing and The Border Areas Unitary State Of Indonesia (An Analysis In Law Perspective). *International Journal of Scientific and Technology Research* (2015), 4(12), 89–92.

<sup>4</sup> Sjucho, D. W., & Besman, A.. Manajemen Isu Komunisme dalam Bingkai Nasakom di Era Soekarno (1959-1966). *Jurnal Representamen* Vol, 6 (2020) (02).

<sup>5</sup> Wirawan. *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, . 2013), hal .20-23

yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Ketahanan nasional ini memastikan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, dan perjuangan untuk mencapai tujuan nasional.<sup>6</sup>

Cetak biru pola komunikasi jalan tengah sebenarnya sudah diberikan oleh Soekarno melalui Nasionalis, Agamis dan Komunis.<sup>7</sup> namun seiring dengan dimatikannya komunisme oleh orde baru, maka ruang untuk berkomunikasi hanya tinggal meninggalkan kaum Nasionalis dan Agamis saja, meski dalam berbagai kesempatan, hantu Komunisme kembali dibangun untuk mendapatkan keuntungan elektoral. Penelitian ini juga membuka kemungkinan adanya faksi tambahan lain dalam perjalanan penelitian, termasuk diantaranya adalah faksi yang tidak masuk dalam cetak biru Soekarno, seperti militer maupun *pressure group*.<sup>8</sup>

Nasakom masuk ke seluruh komponenstruktur pemerintahan khususnya pada bidang politik, terbukti dari DPR hasil pemilu yang dibubarkan dan digantikan dengan DPR Gotong Royong. DPR Gotong Royong berisikan ketiga golongan ini: Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Militer. Jika berdasarkan teori Ideologi negara sebagai distorsimaka untuk keadaan seperti ini nasakom dijadikan sebagai penyeimbang kekuatan Militer, PKI dan Islam agar tidak melakukan kudeta kepada penguasa yaitu Presiden. Secara otomatis dengan Nasakom sebagai ideologi negara akan mengakibatkan ketiga golongan ini tidak bisa saling menyerang apalagi mengudeta presiden. Ketiga kekuatan terpaksa untuk bekerja sama dan mengikuti konsepsi dari presiden. NU yang sebelumnya menolak masuknya PKI kedalam pemerintahan mengubah sikapnya setelah Nasakom dikeluarkan dengan melakukan kerja sama dengan nasakom sebagai porosnya dan mendukung paham Nasakom di terapkan pada semua bidang pemerintahan. Seperti yang dilakukan oleh NU di Banyuwangi yang seepakat bekerja sama dengan PKI dan PNI didalam kabinet pemerintahan dengan Nasakom sebagai porosnya.<sup>11</sup> Tidak hanya pernyataan NU di daerah saja, pihak PBNU juga menyatakan kesepakatannya dengan Nasakom.<sup>9</sup>

Era demokrasi terpimpin memberikan suasana baru dalam perpolitikan Indonesia. Sistem ini menempatkan Sukarno menjadi pemegang kekuasaan tertinggi sehingga mengakibatkan kekuatan-kekuatan politik lainnya yang ada menggantungkan harapannya pada presiden. Munculnya paham Nasakom juga kian memperkuat kedudukan Sukarno dan menghambat kekuatan lain untuk menandinginya. Nasakom mengisolasi kekuatan-kekuatan politik yang ingin menambah kekuatannya dalam konstalasi politik era demokrasi terpimpin. Hanya PKI yang mendapat keuntungan lebih berkat adanya Nasakom. Maka dengan demokrasi terpimpin dan Nasakom sebagai ideologinya Sukarno mampu mengimbangi tiga kekuatan yang ada: Militer, PKI dan Islam. Ancaman kudeta dari kekuatan-kekuatan yang ada pun mampu diminimalisir dengan baik berkat diterapkannya Nasakom kedalam perpolitikan Indonesia.<sup>10</sup>

Soekarno mencoba untuk memfasilitasi semua ideologi yang berkembang di masa itu, Nasakom menjadi salah satu pilihan populer bagi Soekarno sebagai jalan tengah. Sehingga komunisme seolah mendapat tempat di Indonesia pada masa Soekarno. Secara psikologis dalam pendekatan ideosinkratik soekarno dalam pidato resmi selalu melakukan pendekatan visioner tentang sikap dan politik Indonesia masa itu. Sehingga tak jarang pidato-pidato dari Soekarno cenderung provokatif dan bahkan persuasif, ini menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pola pikir Soekarno sehingga muncul istilah nasakom. Dalam beberapa pendapat, Soekarno menjadi salah satu pemimpin Indonesia yang terkenal di dunia. Kondisi semacam ini tidak bisa hanya dilihat dari aspek lingkungan internasional berupa perang dingin kala itu, namun secara karakter kepemimpinan memang Soekarno layak dengan pemimpin dunia lainnya.

## B. Metode

Dalam artikel sederhana ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan persoalan kepemimpinan Soekarno, nasakom dalam pendekatan ideosinkratik. Ini menjadi salah satu bagian penting dalam penelitian ini karena penulis mencoba untuk memasukan beberapa faktor

<sup>6</sup> Op.cit Sjucho, D. W., & Besman, A. (2020). Manajemen Isu Komunisme dalam Bingkai Nasakom di Era Soekarno (1959-1966). *Jurnal Representamen* Vol, 6(02).

<sup>7</sup> Winata, L. Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965. *Avatara*, eJournal Pendidikan Sejarah, . (2017) 5(3), 728–737.

<sup>8</sup> Hassan, M. H.. Explaining Islam's Special Position and the Politic of Islam in Malaysia. *Muslim World*, 97(2007) (2), 287–316.

<sup>9</sup> Winata, L. Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965. *Avatara*, . (2017). 5(3).

<sup>10</sup> Ibid

penting berupa variable dependen dan independen sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian. Penulis juga menggunakan metode studi kepustakaan karena bisa memudahkan penulis untuk mencari sumber-sumber valid baik dalam bentuk sekunder dan tersier. Sumber tersebut berupa data-data dari internet, semisal artikel ilmiah, jurnal bereputasi, berita online, buku online bahkan beberapa catatan penting yang termuat dalam media massa online yang hari ini mudah untuk dilakukan akses.

### C. Temuan dan Diskusi

Masa orde lama menjadi rezim politik dan pemerintahan pertama yang terjadi di Indonesia. Masa pra dan pasca proklamasi menjadi topik hangat pada masa itu. Hal ini menjadi bagian penting bahwa orde lama masih menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan lantaran masa orde lama menjadi penentu nasib Indonesia, bertahan atau selesai. Maksudnya bahwa apabila masa orde lama tidak mampu mempertahankan kemerdekaan maka jelas bangsa Indonesia hari ini masih dalam kuasa colonial Belanda. Dalam dinamika lain, Soekarno mencoba menjadikan Indonesia sebagai Negara ramah ideologi dengan membuat nasakom, yang mana hal tersebut sebagai jalan tengah seperti yang dijelaskan di awal.

Soekarno bisa jadi adalah salah satu presiden yang punya peranan penting dalam kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Secara psikologis Soekarno adalah seorang pemimpin yang visioner dan revolusioner. Tempat, waktu dan keadaan membentuk karakter tersebut, sehingga apabila pada saat orde lama Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang tanpa visi maka jelas Indonesia tidak mampu mempertahankan kemerdekaannya. Selain itu, Soekarno adalah salah satu negosiator dan diplomat mahir yang dimiliki Indonesia. Soekarno tidak pernah minder untuk berhadapan dengan pemimpin besar Negara lain semisal dari Amerika Serikat, China, Uni Soviet (Rusia) dan Eropa. Dalam buku dibawah bendera revolusi bisa dilihat bahwa Soekarno tidak pernah selalu mengedepankan persamaan hak dalam setiap kunjungan kenegaraan yang dilakukan. Walaupun secara tersirat Soekarno lebih senang berkunjung ke Uni Soviet ketimbang Amerika Serikat.

#### a. Nasakom dan Pilihan Politik Jalan Tengah

Nasakom hasil dari buah pemikiran Soekarno ini lahir disebabkan oleh kondisisosial pergerakan di Indonesia, terutama saat Demokrasi Liberal dijalankan di Indonesia. Terlalu banyak kepentingan dan penggunaan jalan perjuangan yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda pula. Hal ini selain menimbulkan konflik di tataran politik, juga menimbulkan konflik terbuka seperti pemberontakan maupun percobaan kudeta dengan kekerasan. Tidak adanya persatuan dalam visi Indonesia dibawa ke mana mendorong Soekarno untuk mengaplikasikan Nasakom dalam koridor Demokrasi Terpimpin.<sup>11</sup> Nasakom kemudian menjadi ambisi dan cita-cita politik Soekarno selama masa pergerakan prakemerdekaan hingga ke masa revolusi Pasca-Kemerdekaan yaitu sampai pada masa Demokrasi Terpimpin. Tidak mudah bagi Soekarno untuk mengaplikasikan pemikirannya tersebut. Tajamnya perbedaan di antara ketiga golongan ini dan pertentangan-pertentangan dari tokoh-tokoh lain membuat Soekarno tidak serta-merta mampu mengaplikasikan pemikirannya kedalam sistem politik Indonesia.<sup>12</sup>

Konsep pemikiran Soekarno tentang Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965) bukan pemikiran politik yang muncul tiba-tiba, tapi merupakan sebuah konsep pemikiran yang telah ia rumuskan sejak tahun 1920-an. Pada masa mudanya Soekarno telah memiliki cita-cita besar menggabungkan tiga ideologi yang saat itu sangat berpengaruh dan memiliki akar yang kuat di kalangan kaum pergerakan.<sup>13</sup> Soekarno muda menuangkan gagasan “utopianya” ke dalam tulisan yang berjudul Islam, Nasionalisme dan Marxisme pada tahun 1926, tulisan itu dimuat di Suluh Indonesia Muda secara berseri. Dalam tulisannya Soekarno memandang perlunya ketiga ideologi untuk bersatu melawan imperialisme Belanda, karena untuk melawan kaum penjajah diperlukan suatu kekuatan efektif yang menghimpun semua unsur kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Keyakinan sinkretismenya ini tetap Soekarno pertahankan sampai akhir hayatnya, baginya persatuan menjadi suatu yang penting serta menjadi prioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan

<sup>11</sup> Op.Cit Sjucho, D. W., & Besman, A. (2020). Manajemen Isu Komunisme dalam Bingkai Nasakom di Era Soekarno (1959-1966). *Jurnal Representamen Vol, 6*(02).

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Argenti, G. (2017). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Politikom Indonesiana, 2*(2), 14-14.

<sup>14</sup> Fajrin, M. N. D.. Posisi Islam dalam Gagasan Nasionalisme, Agama dan Komunisme Soekarno (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2019). Hl. 67-69

bernegara. Bahkan secara terang-terangan di hadapan publik, misalnya pada sebuah pidato Soekarno mengaku bahwa darahnya adalah darah nasakom, pidato yang disampaikan dalam acara pembukaan Kongres Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 16 September 1959 itu, Soekarno secara terbuka mengatakan bahwa dirinya masih memegang ideologi campuran yang menurutnya dapat dipandang aneh oleh orang lain, dari situ kita dapat melihat betapa konsistennya Soekarno pada ajarannya.<sup>15</sup>

Peta sosial masyarakat tersebut, memperlihatkan pemilahan sosial yang bersifat kumulatif dan konsolidatif, karena telah terjadi proses penguatan dalam hal pengelompokan sosial terutama di Pulau Jawa. Orang-orang abangan serta priyayi memiliki orientasi politik dan ekonomi yang berbeda dengan orang-orang santri. Kaum abangan dan priyayi ini cenderung memilih untuk berpihak kepada partai politik yang tradisional, sekular dan nasionalistik. Sementara orang-orang santri cenderung memilih untuk berpihak pada partai-partai Islam. Secara historis masyarakat Jawa dibentuk untuk berdiri di dua kaki, tradisionalisme-feodalisme yang lahir dari fase sejarah masyarakatnya sendiri dan modernisme-rasionalistik yang dicangkokkan oleh panjajah kolonial.<sup>16</sup>

#### b. Soekarno, Idiosinkratik dan Orde Lama

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, dua hari kemudian Indonesia menyatakan kemerdekaan di bawah pimpinan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa periode dan babak sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Setelah memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka, Indonesia berusaha membenahi stabilitas negara untuk membentuk suatu negara yang berdaulat. Dalam masa awal kemerdekaan dibentuklah BPUPKI sebagai badan yang menyiapkan kemerdekaan. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dibutuhkan suatu dasar negara untuk bisa menjalankan kehidupan pemerintahan bernegara. Pembentukan dasar negara ini memerlukan suatu penggodokan yang matang mengingat Indonesia yang baru merdeka memiliki keanekaragaman budaya dan keyakinan.<sup>17</sup>

Perkembangan demokrasi liberal yang ditandai dengan banyak partai itu ternyata tidak menguntungkan bagi negara yang berdasarkan Pancasila ini. Persaingan antar golongan atau partai tidak terelakkan. Persaingan itu menjurus kepada pertentangan golongan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Sebab masing-masing partai atau golongan ingin menangnya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan umum. Akibatnya pemerintah menjadi tidak stabil. Kabinet yang dibentuk jatuh bangun karena saling tidak percaya di antara masing-masing partai yang ada di DPR.<sup>18</sup>

Periode pasca kemerdekaan (demokrasi parlementer) merupakan masamasa yang paling indah bagi demokrasi di Indonesia. Karena pada masa itu semua institusi demokrasi dapat memainkan fungsinya secara maksimal, partai-partai politik tumbuh bagai cendawan dimusim hujan, dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi, terutama dalam menentukan kepengurusan, pemilihan platform dan aktivitas mobilisasi dukungan, media pun berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang sangat efektif.<sup>19</sup>

Dengan segala pengharganya terhadap sistem parlementer tersebut, kita juga harus objektif bahwa selama sistem parlementer yang diterapkan di Indonesia pada masa tahun 1945-1949 dan 1950-1959, telah gagal menciptakan kehidupan politik yang stabil serta kodusif, sering terjadinya pergantian kabinet akibat mosi tidak percaya dari parlemen dan berlarut-larutnya pembahasan dasar negara di badan konstituante menjadi bukti kegagalan sistem tersebut. Ada beberapa fakto yang menjadi penyebab kegagalan demokrasi parlementer ketika diterapkan di Indonesia.<sup>20</sup>

Dalam kondisi yang lain secara pribadi Soekarno memang lebih memilih jalan tengah sebagai keputusan politik masa orde lama terkait nasakom. Dalam beberapa kondisi ini memang secara tidak langsung mengharuskan Soekarno untuk menempub kebijakan tersebut. Pengaruh kepribadian

<sup>15</sup> Soyomukti, Nurani, Soekarno dan Nasakom, (Yogyakarta : Garasi, 2008) hal 67-69

<sup>16</sup> Op.cit Argenti, G. Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Politikom Indonesiana*, . (2017), 2(2), 14-14.

<sup>17</sup> Adang Muchtar Ghazali, Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 123

<sup>18</sup> Qodri A. Azizy, Jejak-jejak Islam Politik. (Jakarta: Ditjen Bagais. 2004), hal. 221

<sup>19</sup> Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hal ]. 45-47

<sup>20</sup> Op.cit Argenti, G.. Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Politikom Indonesiana*, (2017), 2(2), 14-14.

pemimpin dalam menentukan keputusan tentu menjadi soal faktor yang bisa dominan. Namun dalam pendekatan sosiologi politik tentu hal ini akan berbeda. Dengan temuan bahwa pribadi Soekarno yang parolente dan fashionable ternyata dalam menentukan keputusan tentang nasakom menjadi pelik pada akhirnya. Kedekatan Soekarno dengan Kremlin dan Beijing masa itu tentu punya pengaruh kuat terhadap munculnya nasakom.

Beberapa literatur yang berhubungan dengan sepak terjang Soekarno masa orde lama lebih pada persoalan kepemimpinan yang visioner. Menjelaskan tentang Indonesia pra dan pasca kemerdekaan, gelombang perang dingin yang sedang memanas dan poros-poros yang terjadi masa itu. Hanya saja secara akademis penulis memberikan analisis bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia memang berat, dan Apabila Soekarno tidak melakukan politik jalan tengah di dalam dan luar negeri maka perjuangan secara fisik dan diplomasi akan sia-sia adanya.

Dengan penjelasan semacam itu, tentu faktor ideologis seorang Soekarno yang nasionalis menjadi faktor penentu pada beberapa kebijakannya di masa orde lama. Maka jelas bahwa nasionalisme Soekarno menjadi jalan tengah atas keputusannya. Melihat dari kondisi dalam negeri yang penuh dengan gejolak maka nasakom menjadi solusi cerdas masa itu. Namun perlu diketahui bahwa diantara gejolak yang terjadi pada masa orde baru, nasakom juga menjadi catatan sejarah tersendiri dalam dinamika politik di Indonesia.

#### **D. Kesimpulan**

Nasakom menjadi salah satu kebijakan populis pada masa orde lama. Penerimaan atas berbagai macam ideology besar di Indonesia menjadi pilihan jalan tengah untuk mengakomodir banyaknya ideology yang berkembang pada masa itu. Dengan sikap konsisten Soekarno sebagai seorang nasionalis tentu sadar bahwa persoalan kesatuan Negara pasca kemerdekaan menjadi faktor penting bagi keberlanjutan bangsa Indonesia kedepan. Hal ini yang kemudian membedakan Soekarno dari pemimpin lain yang pernah lahir di Indonesia. Tidak sebagai personal yang cerdas secara emosional, namun juga sosok yang punya dan mampu membawa Indonesia punya wibawa yang besar di dunia Internasional. Kemungkinan lain juga bisa terjadi apabila Soekarno tidak memilih nasakom sebagai ideologi tengah, gejolak politik nasional bisa jadi lebih resisten karena Soekarno bisa dianggap tidak nasionalis padahal hal tersebut sangat di butuhkan Indonesia masa itu.

Kondisi politik domestic dan internasional masa orde lama menjadi ciri yang berbeda dari rezim politik yang ada di Indonesia. Gejolak dan resistensi politik dalam negeri saat itu seolah memaksa Soekarno untuk mengambil jalan tengah, hal ini juga bisa tercermin dalam konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan melakan gerakan non-blok. Artinya bahwa Soekarno memainkan politik jenius pada saat itu. Dengan memilih dan memilah keperluan mendesak apa yang kemudian dibutuhkan Indonesia. Hanya saja ketika persoalan politik menjadi topic utama ternyata soal ekonomi berupa kepentingan nasional Indonesia menjadi hal yang dikorbankan. Sehingga resesi dan inflasi tinggi terjadi di Indonesia pada masa itu.

#### **E. Daftar Kepustakaan**

- Adang Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: PustakaSetia, 2004)
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Argenti, G. (2017). *Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin*. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2),
- Fajrin, M. N. D.. *Posisi Islam dalam Gagasan Nasionalisme, Agama dan Komunisme Soekarno* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
- Hassan, M. H.. *Explaining Islam's Special Position and the Politic of Islam in Malaysia*. *Muslim World*, 97(2007) (2)
- Manuputty, A., Patittingi, F., & Ashri, M.. *The Existence Of Leading Islands Securing and The Border Areas Unitary State Of Indonesia (An Analysis In Law Perspective)*. *International Journal of Scientific and Technology Research* (2015), 4(12)
- Qodri A. Azizy, *Jejak-jejak Islam Politik*. (Jakarta: Ditjen Bagais. 2004)
- Sjuchro, D. W., & Besman, A.. *Manajemen Isu Komunisme dalam Bingkai Nasakom di Era Soekarno (1959-1966)*. *Jurnal Representamen Vol, 6* (2020) (02).
- Soyomukti, Nurani, *Soekarno dan Nasakom*, (Yogyakarta : Garasi, 2008)

- Wirawan. Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, . 2013),
- Winata, L. Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965. Avatara, eJournal Pendidikan Sejarah, . (2017) 5(3)

**Internet**

<https://tirto.id/sejarah-nasakom-upaya-sukarno-menyatukan-tiga-kekuatan-politik-dnlt> diakses pada 24/02/2023 pukul 19.09